

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 71 TAHUN 2010
TERHADAP BELANJA PENANGANAN COVID-19
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS PP 71 YEAR 2010 ON COVID-19 HANDLING EXPENDITURE**

Suci Ardilla Ramadhani Harahap¹, Juliana Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{1, 2}Jl. William Iskandar Ps.V Medsan Estate Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara

e-mail: suciardrahrp21@gmail.com ¹juliananasution@uinsu.ac.id ²

Sejarah Artikel: Diterima Maret 2022, Disetujui April 2022, Dipublikasikan Juni 2022

ABSTRAK

Meningkatnya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia membuat pemerintah Indonesia tidak mungkin tinggal diam dalam hal ini, salah satunya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara menurut surat edaran sekretaris jendral ATR/BPN 2/SE-100.3/II/2021 membuat keputusan mengenai belanja penangan covid-19 di bagi menjadi empat akun baru. Penelitian ini memiliki satu tujuan yakni untuk mengetahui kecukupan penerapan standar akuntansi pemerintahan terkait biaya penanganan COVID-19 pada masa pandemi COVID-19 di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dengan PP 71 Tahun 2010. Penelitian ini di lakukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif dan dianalisis secara deskriptif. Penerapan SAP pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan keuangan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah sesuai dan telah mengikuti kaidah-kaidah pada PP Nomor 71 Tahun 2010. pengalokasian kembali anggaran aktivitas dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara sejalan dengan surat edaran edaran Menteri Keuangan SE-6/MK.02/2020. Berbagai aktivitas penanganan Covid-19 menemui beberapa hambatan seperti belum terbayarnya anggaran dan kelangkaan produk tertentu. Pada periode anggaran berikutnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Utara akan terus menerapkan peraturan yang ada untuk mencapai pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif dan pelaporan keuangan yang dipersiapkan dengan baik kepada para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: covid-19, akuntanis, PP 71 2010

ABSTRACT

The increase in the Covid-19 pandemic that has an impact on the economy in Indonesia makes the Government of Indonesia not stay silent in this regard, one of which is at the Regional Office of the National Land Agency of North Sumatra based on the circular letter of the secretary-general of ATR / BPN 2 / SE-100.3 / II / 2021 to decide the spending of covid-19 handlers in the division into four new accounts. This research aims to determine the suitability of implementing government accounting standards on covid-19 spending during the Covid-19 pandemic at the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara with PP 71 of 2010. This research was conducted at the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Research is carried out by descriptive assessment methods and analyzed descriptively. The application of SAP to the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara has been in accordance with PP 71 of 2010. Financial reporting at the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Has followed the rules in PP Number 71 of 2010. Relocating the activity budget and Reallocation of the K / L Budget to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) at the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara by the circular letter of the Minister of Finance SE-6 / MK.02 / 2020. Some Covid-19 handling activities have experienced several obstacles in the form of budgets that have not been disbursed and scarcity in certain goods. Expected on a budget in the next period, the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional North Sumatra to still refer to the established regulations to realize effective State Financial Management and financial statements that are prepared appropriately for interested parties.

Keywords: covid-19, accounting, PP 71 2010

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, tingkat kepentingan masyarakat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keadaan perekonomian negara. Hal ini juga memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dan untuk mencari solusi bersama. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara bernilai positif, dianggap negara tersebut bisa meningkatkan produksi barang dan jasanya menurut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga kualitas sumber daya manusianya dalam pengelolaan semua kekayaan alam.

Dibutuhkan sistem akuntansi saat mengidentifikasi persoalan dalam perekonomian. Menurut AAA (American Accounting Association), akuntansi ialah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memastikan evaluasi dan informasi yang jelas dan penting mengenai pemakai informasi (Sengkey et al. 2022). Fungsi Akuntansi ialah analisis sensitif untuk data atau transaksi keuangan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan untuk pemakai. Dalam uraian ini kita bisa melihat persoalan dalam sistem akuntansi dan melihat persoalan yang bisa memecahkan solusi untuk persoalan tersebut.

Dalam pemerintahan akuntansi memiliki standarnya sendiri salah satunya yaitu PP 71 Tahun 2010. Manfaat dari diterapkannya Standar akuntansi dalam pemerintahan ini adalah Pelaporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan komprehensif kepada pemangku kepentingan ((Lamonisi 2016)

Namun, pada Desember 2019, sebuah kasus pneumonia (radang paru-paru) yang tidak diketahui penyebabnya yang berasal dari Wuhan, China mengejutkan dunia. China mengkonfirmasi pneumonia (radang paru-paru) sebagai virus corona baru pada 7 Januari 2020. Dan *Pernyataan "urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause"* telah dikeluarkan oleh *Wuhan Municipal Health Committee* (Hanoatubun 2020).

Diseminasi dan peningkatan COVID-19 telah menyebar ke Indonesia dan seluruh dunia dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa lembaga penelitian kredibel di seluruh dunia memprediksi pengaruh negatif wabah ini terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Kebijakan yang ada memiliki efek positif langsung, tetapi mereka juga bisa memiliki efek negatif yang tidak langsung. Hal ini diketahui saat ini mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh pandemi ini terhadap sektor ekonomi Indonesia antara lain keputusan hubungan kerja, timbulnya PMI manufaktur Indonesia, penurunan aktivitas impor, kenaikan harga/inflasi, kehilangan sektor pariwisata salah satunya dalam bidang hunian (Yamali and Putri 2020).

Disisi lain pengaruh dari covid-19 ini di rasakan juga oleh para pedangang terhusus pedangang yang akan menyalurkan hasil kebun dan taninya kedaerah lain dimana pedangang mengalami kesulitan karena minat belinya sangat berkurang dan terus mengaalami penurunan. Dengan hal ini maka banyak dari ibu rumah tangga turut ikut andil pada perekonomian keluarganya dengan bekerja serabutan, bercocok tanam ataupun yang lainnya.(Ilah et al. 2021)

2 Maret 2020 ialah tanggal dimana terdeteksinya kasus pertama Covid-19. Pandemi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan berbeda, termasuk: relokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan kasus, ovid19 sebagai bencana nasional, dan Satgas untuk memfasilitasi penanganan hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Maryani and Putri 2020).

Melalui hal tersebut, Presiden telah menerbitkan Perppu Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Stabilitas Kebijakan Fiskal Publik dan Sistem Keuangan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (COVID19) 2019 dan/atau Perekonomian dan/atau Ancaman Nasional yang berbahaya bagi ekonomi atau stabilitas sistem keuangan. (Juliani 2020). Menurut UU No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Publik, Keuangan publik ialah semua hak dan tanggung jawab negara yang memerlukan uang, dan semua yang ada dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipakai sebagai milik umum untuk memenuhi hak dan tanggung jawab tersebut. Keuangan publik juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu ekonomi yang mengkaji aktivitas pemerintah dalam bidang perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran serta pengaruhnya terhadap perekonomian (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2003).

Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Dalam rangka membantu percepatan pencegahan diseminasi Covid-19 mengambil Tindakan segera melaksanakan realokasi atau efisiensi anggaran belanja operasional dan perjalanan dinas. Tindakan tersebut dilakukan merujuk pada surat edaran Menteri Keuangan SE-6/MK.02/2020 mengenai pengalokasian kembali anggaran aktivitas dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka tindakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dan untuk menindak lanjut surat edaran tersebut maka Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 2/SE-100.3/II/2021 mengenai pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran di lingkungan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL 2021).

Surat edaran mengkaji mengenai pedoman penyelenggaraan serta tanggung jawab pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian/Pertanahan, salah satunya mengkaji alokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Biaya akuntansi dibagi menjadi dua kategori: biaya langsung dan biaya tidak langsung..

Anggaran belanja salah satu konsep terpenting dalam ilmu ekonomi sebab memakai garis anggaran untuk menggambarkan pembelian dan penjualan komoditas. Oleh karena itu, disebut juga rencana yang dibuat organisasi untuk mengukur hasil aktivitas (Subarkah 2012). Anggaran penanganan Covid-19 merupakan hasil realokasi anggaran secara langsung. Anggaran untuk biaya langsung secara langsung tergantung pada program dan aktivitas yang sebelumnya telah dirancang. Dan bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang & Jasa 3. Belanja Modal. (Lengkong and Tinangon 2022).

Belanja penanganan covid-19 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara di atur dengan surat edaran 2/SE-100.3/II/2021 dimana dalam surat edaran tersebut, telah mengatur 4 nomor akun baru dalam belanja penanganan covid-19. Akun-akun tersebut yakni: 1) 521131, 2) 522192, 3) 52124 dan, 4) 536118.

Dengan akun-akun baru tersebut memotivasi penulis untuk mengetahui

kesejalaran penerapan standar akuntansi pemerintahan mengenai belanja penanganan covid-19 di masa pandemi pada kantor wilayah badan pertanahan nasional sumatera utara dengan PP 71 tahun 2010.

Dimana dengan adanya pengalokasian kembali dan alokasi anggaran kembali dalam rangka percepatan penanganan pandemi covid-19 akan berpengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah dimasa pandemi ini beralaskan PP No.71 Tahun 2010 pada PSAP No. 2 mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar akuntansi pemerintahan disajikan menurut PSAK No 02, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya sendiri untuk suatu periode, sehingga LRA yang disajikan bisa menonjolkan unsur pendapatan, pengeluaran dan pendanaan lainnya dibutuhkan untuk Presentasi (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2010).

LRA merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan salah satunya adalah citra syarat suatu pemerintah & menjadi satu cara bagi pemerintah terkait buat mewujudkan akuntabilitas keuangannya (Saderi and Sriwardany 2021).

Menurut uraian diatas, Maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap Belanja Penanganan Covid-19 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah data kualitatif dan kuantitatif dari data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, serta sumber data sekunder yang mendukung data primer.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara, yakni dengan melaksanakan pertemuan secara langsung melalui tanya jawab dengan bendahara pengeluaran, operator UAKPA_W dan operator UAKPA. Dokumentasi, yakni, pengumpulan dokumen yang dibutuhkan untuk persoalan yang teliti serta catatan penting.

3. Metode Analisis

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode deskriptif. Dengan menghimpun, mengelompokkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang didapat untuk diselidiki, serta bisa dengan jelas memahami situasi yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pemakaian anggaran penanganan COVID-19 Kanwil Pertanahan Sumut menurut data yang diterima. Karena timbulnya virus corona mempengaruhi penganggaran biaya, yakni timbulnya biaya untuk memerangi COVID-19.

Tabel 1:
Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Per 31 Desember 2021

Nomor Akun	Uairan	Anggaran	Realisasi	Selisih
521131	Belanja barang oprasional - penanganan pandemi covid-19	Rp 36.837.000	Rp 25.449.164	Rp 11.837.836
522192	Belanja jasa - penanganan pandemi covid-19	Rp 31.626.000	Rp 14.200.191	Rp 17.425.809
521241	Belanja barang non-oprasional - penanganan covid-19	Rp 15.200.000	Rp 13.499.500	Rp 1.700.500
536118	Belanja modal lainnya- penanganan pandemic covid-19	Rp 28.700.000	Rp 26.350.650	Rp 2.349.350

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (data diolah)

Realokasi anggaran ialah pengalokasian kembali anggaran aktivitas dari hasil pemusatan anggaran harus dialokasikan untuk suatu aktivitas yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh mekanisme perubahan anggaran dengan cara memindahkan/merelokasi anggaran dari aktivitas sebelumnya ke aktivitas lain. Contohnya pada saat ini yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk COVID 19. Menurut hasil wawancara akibat pandemi covid-19 sektor Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang melaksanakan *refocussing* aktivitas/realokasi untuk program yakni pembiayaan untuk pembelian belanja barang operasional – penanganan pandemi Covid-19. Contoh kegiatan yang telah di capai dari penanganan Covid-19 ini berupa penyemprotan disinfektan dan upaya dalam pengadaan tempat cuci tangan.

Penjurnalan

Tabel 2:
Belanja barang oprasional - penanganan pandemi covid-19

Tanggal	No. bukti	Nomor akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
7 januari 2021		521131	Belanja barang oprasional - penanganan pandemi covid-19 (Disinfektan, Teleconference, Masker, Thermogan, Hand sanitizer) Kas bendahara		25.449.164	25.449.164

Sumber: Data Diolah

Tabel 3:
Belanja jasa – penanganan pandemic Covid-19

Tanggal	No. bukti	Nomor akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
14 Januari 2021		522192	Belanja jasa – penanganan pandemic Covid-19 (Antigen) Kas bendahara		12.200.191	12.200.191

Sumber: Data Diolah

Tabel 4:
Belanja barang non-operasional – penanganan covid-19

Tanggal	No. bukti	Nomor akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
14 Januari 2021		521241	Belanja barang non-operasional – penanganan pandemic Covid-19 (Sarung Tangan Latex, Faceshield, Freshcare, Minyak Kayu Putih, Handsanitizer, Disinfectan, Masker, tissue, Hansaplast) Kas bendahara		13.499.500	13.499.500

Sumber: Data Diolah

Tabel 5:
Belanja modal lainnya – penanganan pandemic covid-19

Tanggal	No. bukti	Nomor akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
14 Januari 2021		536118	Belanja modal lainnya – penanganan pandemic Covid-19 (Swab) Kas bendahara		26.350.650	26.350.650

Sumber: Data Diolah

Penyajian Laporan keuangan

Laporan keuangan ialah laporan yang memperlihatkan kondisi keuangan suatu perusahaan/instansi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan pemerintahan disusun dengan pedoman PP 71 Tahun 2010. Pada tahun 2015 sistem akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan. laporan keuangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran

Laporan laba rugi yang dianggarkan menunjukkan perbandingan antara anggaran

dan hasil operasinya, termasuk unsur-unsur pendapatan dan pengeluaran LRA untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, tanggung jawab, dan modal per 31 Desember

3. Laporan oprasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari aktivitas non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang dibutuhkan untuk penyajian yang wajar.

4. Laporan Perubahan modal

Laporan perubahan modal memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan modal pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) memberikan informasi yang berkaitan dengan penjelasan atau daftar rinci atau analisis nilai pos-pos yang disajikan dalam neraca anggaran, neraca, laporan operasi, dan laporan perubahan modal. Selain itu, penyajian informasi yang disyaratkan dan direkomendasikan oleh standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan termasuk dalam CaLK.

Penyajian laporan keuangan disusun dalam 1 periode sebanyak 4 kali yakni: semester II, triwulan III, semester II (unaudited) dan laporan keuangan audited. Dalam penyajian laporan keuangan ini terdapat 2 tahap yakni rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal.

2. Pembahasan

Menurut Keputusan Presiden Nomor 47 Republik Indonesia Tahun 2020 mengenai Kementerian Pertanian dan Penataan Ruang, Kementerian Pertanian dan Penataan Ruang bertugas mendukung misi pemerintah di bidang pertanian/pertanian dan penataan ruang. Presiden dalam kendali pemerintahan negara bagian. Metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan menyusun laporan keuangan Jurnal Pengeluaran Penanganan Covid 19 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumut diadopsi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Lingkungan Hidup mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam lingkup pemerintah.

Penyesuaian dan realokasi anggaran covid19 diatur dengan Sirkulasi 2/SE100.3/II/2021. Ini akan membuat empat akun baru dengan nomor akun 521131. Yaitu pembelian produk operasional untuk menghadapi pandemi Covid 19, pembelian nomor rekening 522192 yaitu layanan untuk menangani pandemi Covid 19, pembelian nomor rekening 521241 yaitu non operasional produk yang memproses Covid 19, dan terakhir rekening Nomor 536118, belanja modal lain untuk penanganan pandemi Covid 19.

Dalam pengalokasian anggaran Covid-19 telah Menyusun penganggaran penanganan covid-19, namun terhambat karena beberapa hal yakni anggaran yang belum cair dan juga kelangkaan bahan dan barang yang merupakan aktivitas dari penanganan covid-19.

Realokasi dan pemusatan Kembali anggaran yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah akibat pandemi COVID-19 mewajibkan kantor Wilayah badan pertanahan nasional sumatera utara memutar otak supaya seluruh anggaran yang diterima dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Memastikan tidak ada hambatan dalam pencapaian tujuan bisnis dan tidak ada hambatan dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan biaya pengobatan COVID-19.

Anggaran Belanja barang oprasional - penanganan pandemi covid-19 yang terealisasikan yakni 69,09% atau sebesar Rp. 25.449.169 dari total alokasi anggaran Rp. 36.837.000. Untuk anggaran belanja jasa - penanganan pandemi covid-19 yang terealisasikan yakni 44,90% atau sebesar Rp. 14.200.191 dari total alokasi anggaran Rp. 31.626.000 . Untuk anggaran Belanja barang non-oprasional - penanganan covid-19 yang terealisasikan yakni 67,57% atau sebesar Rp. 13.499.500 dari total alokasi anggaran Rp. 15.200.000 . Untuk anggaran Belanja modal lainnya-penanganan pandemic covid-19 yang terelaisasikan sebesar 91,81% atau sebesar Rp. 26.350.650 dari total alokasi anggaran 28.700.000.

Keseluruhan anggaran belanja penanganan Covid-19 telah terealisasikan yakni 70,75% atau sebesar Rp. 79.499.505 dari total alokasi anggaran Rp. 112.363.000.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan SAP pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan keuangan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah mengikuti kaidah-kaidah pada PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Pengalokasian Kembali anggaran Aktivitas dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara sejalan dengan surat edaran

edaran Menteri Keuangan SE-6/MK.02/2020

3. Beberapa aktivitas penanganan Covid-19 mengalami beberapa hambatan berupa anggaran yang belum di cairkan dan kelangkaan pada barang tertentu.

Saran

1. Diharapkan Kanwil BPN Sumut pada anggaran periode berikutnya tetap berfokus pada aturan yang sudah ditentukan untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang baik bagi pemangku kepentingan dan pengelolaan keuangan publik yang efektif.
2. Kedepannya Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara lebih meningkatkan lagi kinerja yang ada supaya semua susunan atau rencana program aktivitas akan berjalan sebagaimana selayaknya yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanoatubun, Silpa. 2020. "DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 2(1): 146–53.
- Ilah, Dedeh, Rita Patonah, and Tati Haryati. 2021. "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Girilaya." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi)* 9(1): 43–56.
- Juliani, Henny. 2020. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." *Administrative Law and Governance Journal* 3(2): 329–48.
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL. 2021. "SURAT EDARAN NOMOR: 2/SE-100.3/II/2021." : 1–81.
- Lamonisi, Sony. 2016. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(1): 223–30.
- Lengkong, Fetty, and Jantje Tinangon. 2022. "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 Terhadap Belanja Tak Terduga Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara Evaluation of the Implementation of Government Accounting Standards PP." 5(2): 469–76.
- Maryani, Siti, and Noviyati Rahardjo Putri. 2020. "COMMUNITY-BASED FOOD SECURITY EFFORTS IN THE FRAMEWORK OF NUTRITION FOLLOWING MOTHER AND CHILDREN IN THE PANDEMIC PERIOD (COVID - 19): LITERATURE REVIEW." *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research* 2(2): 43–47.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 2003. "NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA." : 1–40.
- . 2010. "Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010." : 1–413.
- Saderi, and Sriwardany. 2021. "Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara." 1(1): 44–53.
- Sengkey, Chrifano et al. 2022. "Evaluasi Penerapan A Kuntansi A Set T Etap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of The Application of Fixed Assets Accounting At The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province ." 5(2): 441–50.
- Subarkah, Pujiatmo. 2012. "Penyusunan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten." *Jurnal Desentralisasi* 10(2): 193–204.
- Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 384.

